

BAB IV

ANALISIS GOLPUT MASYARAKAT KARIMUNJAWA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Analisis Golput di Kalangan Masyarakat Karimunjawa Pada Pileg 2014

Telah disebutkan di atas bahwa masyarakat Karimunjawa terdiri dari beberapa suku yaitu Jawa, Madura, Bugis, Bajo, Batak, Ambon, Buton dan Dayak. Jawa adalah suku mayoritas di Karimunjawa yang rata-rata mereka berdomisili di Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang, Pulau Nyamuk dan Pulau Genting. Madura berada di Dukuh Legon Cikmas Desa Karimunjawa, dan membaur di pulau-pulau lain. Bugis terkumpu di Dukuh Telaga Desa Kemujan dan juga membaur di pulau-pulau lain. Bajo mebuat komunitas sendiri di ujung selatan Pulau Karimunjawa lengkap dengan rumah lautnya yang nyentrik sekaligus menjadi daya tarik wisata tersendiri.

Adapun suku-suku lainnya yang ada di Karimunjawa membaur dengan suku lain namun dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang membedakan diantara mereka, semua dijalani dengan damai tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran. Masyarakat Karimunjawa selalu menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, walau mayoritas muslim dan kristen adalah minoritas akan tetapi mereka tetap hidup

rukunan dan mereka sangat mersa hidup harmonis, dengan begiu masyarakat Karimunjawa pantas ditiru oleh bangsa yang besar ini.

Meskipun sudah menjadi taman nasional, akan teapi Karimunjawa bisa disebut dengan pulau terpencil, banyak masyarakat yang pergi kedaerah lain untuk mencari penghasilan dan juga mennuntut illmu yakni sekolah dan kuliah bahkan nyantri. hal ini yang menjadikan partisipasi ntuk menggunakan hak pilihnya di Karimunjawa tidak bisa digunakan, akan teapi belum tentu mereka golput atau tidak menggunakan hak pilih, besar kemungkinan mereka tetap menggunakan hak pilihnya ditepmat mereka merantau, akan tetapi ada juga yang tetap tinggal di Karimunjawa namun mereka tetap tidak menggunakan hak pilihnya, alasan mereka pun bermacam-macam.

Penyebab golput pada pileg 2014, menurut penulis disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, faktor psikologis yakni adanya kekecewaan pada elit-elit politik. Dalam hal ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elit politik khususnya pemerintah sangat rendah, sehingga yang terjadi adalah sikap apatis. Bagi mereka ikut memilih tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa yang pada akhirnya minat untuk berpartisipasi menjadi tidak ada. Selain faktor kekecewaan tersebut, ada juga faktor lain yang ikut mempengaruhinya seperti faktor pendidikan, ekonomi, demografi, liberalisasi politik, dan daftar pemilih kurang akurat juga termasuk sebagai penyebab meningkatnya golput pileg 2014.

Meningkatnya angka golput meliputi ketidak hadiran dan hadir akan tetapi tidak mencoblos di Karimunjawa dari pileg tahun 2009 ke pileg 2014 mencapai 0,9%, selain itu Karimunjawa merupakan angka golputnya paling tinggi se-Kabupaten Jepara. Dalam pengamatan dan data yang didapatkan penulis, maka penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menjadikan angka golput naik hingga 0,9 %.

Pertama: masyarakat di Karimunjawa tidak memiliki sekaligus golput karena tidak adanya figur para calek yang benar-benar dikenal oleh masyarakat Karimunjawa, baik dikenal secara pribadi, figur dan visi maupun misinya. Ada beberapa hal masyarakat tidak mengenal para calek, yaitu, tidak adanya para caleg yang melakukan kampanye di wilayah Karimunjawa, tidak ada calon yang berasal dari Karimunjawa. seperti Nor misalnya dia tidak menggunakan hak pilihnya karena dia tidak mengenal karakter para calon legislatif, menurut dia persoalan memilih pemimpin bukan hanya persoalan menggunakan hak pilih, tetapi mengenal karakter seseorang calon tersebut juga penting, selain itu alasan laki-laki yang berprofesi seorang guide ini adalah dia tidak memilih karena belum tentu seorang pemimpin yang ia pilih benar-benar memperhatikan rakyat pada umumnya dan dirinya sendiri pada khususnya.

Kedua: Masyarakat Karimunjawa golput karena mereka menganggap bahwa kinerja pemimpin tidak mempengaruhi pada kondisi perekonomian masyarakat, mereka menganggap kinerja pemerintah hanya sampai pada tingkat perkotaan dan daerah yang dekat dengan pusat

pemerintahan, ada atau tidak ada pemimin rakyat kehidupan mereka tetap sama, artinya makan tetap mencari sendiri, pemerintah tidak pernah membantu perekonomian mereka, sebagai contohnya adalah kasnawi yang berrmatapencarian sebagai seorang nelayan, dia mengungkapkan bahwa memilih atau tidak memilih tidak ada efek negatif atau positif baginya, memilih atau tidak memilih dia tetap bekerja sebagai seorang nelayan, justru ketika hari pemungutan suara kasnawi tidak melaut malah dia merasa rugi karena dihari itu kasnawi tidak mendapatkan penghasilan. hal tersebut juga senada dengan ungkapan Teguh Yuwono dosen Fisip Undip.

Ketiga: Karimunjawa mendapatkan predikat terbesar sebagai Kecamatan yang angka golputnya tertinggi di Jepara karena para penduduk Karimunjawa sangat banyak yang merantau untuk bekerja dan menuntut ilmu, dan ketika hari pemungutan suara mereka tidak berada di Karimunjawa, seperti yang dikatakan Subhan Anggota KPU Jepara, Muslihan Anggota PPK Karimunjawa, Hisyam Zamroni tokoh masyarakat Karimunjawa, Abdul Rozaq Kamituo desa kemujan, dan Camat Karimunjawa.

Keempat: masyarakat Karimunjawa Tidak menggunakan hak pilih mereka alias golput karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat justru dari tahun ketahun cenderung menurun, kepentingan rakyat dikesampingkan dan mereka justru mendahulukan kepentingan golongan pada umumnya dan kepentingan pribadi untuk

memperkaya diri pada khususnya. sering mereka dapati ketika menonton berita ditelevisi banyak para pejabat yang melakukan korupsi dari tingkat menteri hingga, pejabat negara, bahkan sampai pada pegawai negeri sipil. Selain itu masyarakat cenderung dilupakan dan dirampas haknya. Hal tersebut senada dengan yang dicontohkan Abdul Rozaq, seperti sidang Rancangan undang undang pilkada banyak voting terbanyak dimenangkan wakil rakyat yang menginginkan Pilkada secara tidak langsung, padahal rakyat sudah jelas-jelas menginginkan pilkada langsung dipilih oleh rakyat. Golput juga dilakukan masyarakat sebagai keritik terhadap kinerja dan tingkah para pejabat negara seperti yang dikatakan Sri Bintang Pamungkas.

Kelima: Wilayah Karimunjawa adalah Taman nasional yang sangat terkenal dengan biota lautnya dan juga pulau-pulaunya, secara otomatis banyak wisatawan yang hadir terutama pada saat hari libur, hari pemungutan suara adalah termasuk hari libur, banyak wisatawan yang datang untuk berlibur, penduduk Karimunjawa yang sebagian warganya bermata pencaharian sebagai guide tentunya mereka lebih tertarik untuk bekerja menerima tamu-tamu yang menggunakan jasa mereka. Hal tersebut dikatakan oleh Muslihan anggota PPK Kecamatan Karimunjawa.

Keenam: Karimunjawa sangat jauh dari pusat kota dan terletak di tengah laut dan menempati beberapa pulau, untuk mencapai lokasi tersebut harus menggunakan transportasi laut dan udara. Maka dari itu secara otomatis para caleg jika harus melakukan kampanye disana harus

mengeluarkan banyak biaya, sedangkan penduduknya tidak seberapa. Hal itu yang menjadikan para caleg tidak melakukan kampanye disana. Secara otomatis masyarakat karimujawa jarang sekali yang mengenal figur maupun visi dan misi para caleg.

Ketuju: lokasi yang sulit dijangkau dan penduduk pertempat terpencar di pulau-pulau menjadikan sulitnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka dari itu masyarakat kurang mengerti tentang pentingnya melakukan hak politik untuk memilih pemimpin mereka.

Terdapat lima hal yang menyebabkan angka golput naik di Karimunjawa, akan tetapi yang paling signifikan adalah banyaknya masyarakat Karimunjawa yang merantau untuk bekerja dan menuntut ilmu di luar wilayah Karimunjawa. Entah di perantauan mereka menggunakan hak pilih mereka atau tidak.

B. Analisis Golput dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Terkait dengan golput dalam pemilu, ijtima` silaturrahi MUI di Padang Panjang Sumatra Barat tanggal 23-26 Januari 2009 yang dihadiri oleh 700 ulama dan para cendikiawan muslim tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa golput hukumnya haram. Golput haram bila masih ada calon yang imamah dan imarah apapun itu partainya, ini karena pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih

pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa.¹

Pemilu adalah instrumen untuk penegakan kekuasaan Negara. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana UU nomor 10 tahun 2008). Maka partisipasi warga dalam pemilu merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan, sekaligus kepedulian dalam mengontrol dan mengarahkan kebijakan negara/daerah yang demokratis.

Tentunya demokrasi yang baik demokrasi yang tidak melanggar undang-undang, kesepakatan bersama, dan etika. Perspektif fiqh siyasah, dikenal sekelompok masyarakat yang apatis terhadap situasi pertikaian antara dua kekuatan politik Islam, antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib ra dengan golongan Khawarij, yaitu golongan Murji'ah.

Menghadapi realitas politik tersebut, kaum Murji'ah bersikap politis dengan memilih tidak mengambil sikap politik apapun itu. Sikap apatisisme sebagai bentuk protes atas dua kekuatan politik tersebut terbukti tidak memberikan kontribusi positif bagi kemashlahatan umat. Sikap seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, jika tujuannya adalah keinginan untuk menciptakan perbaikan (ishlah).

Golput di Karimun Jawa dalam pemilu perlu diminimalisir sesegera mungkin dengan memahami akar permasalahan yang menyebabkannya. Jika

¹. Ahmad Fauzan, "Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijtima' Ulama 2009 di Padang Panjang" Skripsi Strata 1, Jogjakarta, perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009, h. 8, td

golput disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap partai politik, maka diperlukan langkah bijak dari para politisi dan KPU untuk terus melakukan sosialisasi pendidikan politik.

Peningkatan jumlah golput jenis ini dalam pemilihan umum sebaiknya dapat menjadi bahan introspeksi bagi partai politik dan KPU, untuk bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisasi.

Golput jika alasannya hanya karena faktor malas atau tingkat kesibukan dalam beraktivitas, maka tingkat kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan perlu diberikan. Kelompok jenis ini adalah kelompok a-politis yang perlu disadarkan.

Golput karena merasa calon pemimpin yang ada, dianggap kurang kredibel juga akan merugi. Karena dengan golput seperti ini akan terpilih calon pemimpin yang tidak diinginkan, jika karena calon yang ada mengobral janji yang muluk-muluk yang tidak mungkin direalisasikan sudah tentu partai politik bisa memperbaiki *recruitment* kadernya. Golput jika karena tidak ada yang bayar, atau mencoblos karena membela yang bayar. Di sini perlu ada kesadaran dan kejujuran dalam memilih, memilih seorang pemimpin merupakan bentuk nasionalisme.

Memilih pemimpin dalam Islam, ditinjau dari sisi keagamaan, dalam konteks kajian fiqh, pemilu masuk dalam kategori *nashibul imam* (mengangkat pemimpin), yang hukumnya *fardlu kifayah* dengan kata lain,

memilih pemimpin yang Muslim, jujur, amanah, cerdas, serta memperjuangkan aspirasi umat Islam, adalah wajib. Sebaliknya, memilih yang tidak seperti itu atau tidak memilih sama sekali sementara pemimpin seperti itu ada, maka hukumnya haram.²

Idris Thaha menyatakan, ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi warga negara dalam politik. *Pertama*, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kedua, sikap dan kepercayaan atau penilaian warga negara terhadap pemerintah. Tetapi, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di pengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.³

Perilaku golput yang dilakukan masyarakat Karimun Jawa tidak dibolehkan atau haram hukumnya. Berdasarkan demografi wilayah masyarakat Karimun Jawa, secara statis hampir 30% hidup merantau. Sehingga demikian, golput yang dimaksud di atas dalam politik Islam dapat dikategorikan sebagai sikap golput yang beralasan kesibukan dan malas.

Berdasarkan tinjauan penelitian dilapangan, masyarakat Karimun Jawa mengaku merasa tidak diperhatikan pemerintah. Sehingga mengakibatkan sikap acuh tak acuh dalam proses pemilu. Dengan demikian, menurut fiqh siyasah hal ini diharamkan.

² Muhaimin, *GOLPUT; dalam Optik Kaum Santri* Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2012, hlm.52.

³*Ibid.*224-225.

Sikap alasan ini tidak logis dan merusak kebudayaan masyarakat, yang menganggap bahwa keputusannya memilih golput disebabkan atas kekecewaan terhadap pemerintah. Menganggap wilayahnya tanpa adanya perhatian dari pemerintah, hal inilah alasan warga karimun jawa *emoh* negara atau golput.

Hal ini di dibantah oleh pendapatnya Ibn Taimiyah (661:728 H), ia menyatakan bahwa, dalam mengangkat kepemimpinan hukumnya wajib memilih pemimpin yang adil. Kepentingan bangsa tak lain adalah kehadiran seorang pemimpin yang adil dan mengaspirasikan kepentingan masyarakatnya.

Lebih baik memilih pemimpin non-Muslim yang adil ketimbang memilih pemimpin muslim tetapi dholim. Seperti dijelaskan diatas, Ibn Taymiyah berpendapat pemimpin penting bagi kelompok manusia sekecil apapun. Ibnu Taymiyah memberikan ulasan menarik terkait keberadaan pemimpin:

“Di sini Rasulullah saw. Mewajibkan salah seorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak (yakni dalam safar), sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya hal itu pada semua bentuk perkumpulan lain yang lebih besar. Juga karena Allah swt telah mewajibkan amar ma'ruf dan nahi 'anil mungkar. Sedangkan proyek besar itu tidak mungkin teralisasi dengan baik tanpa adanya quwwah (otoritas) dan imarah (Kepemimpinan). Demikian pula seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah, seperti jihad, menegakkan keadilan, haji,

melakukan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya dan menegakkan hukuman-hukuman, tidak mungkin semua itu terealisasi tanpa adanya quwwah dan imarah”.⁴

Komentar tersebut memperkuat argumen penulis dalam analisis penulisan ini, bahwa hadis yang penulis sebutkan di awal mencerminkan kebutuhan adanya pemimpin, bukan kewajiban memilih pemimpin. Di mana pemimpin tersebut diharapkan dapat membawa masyarakat pada cita-cita hidup makmur, berkeadilan dan sejahtera.⁵

Karena pemimpin simbol dari setiap bentuk kehidupan⁶, baik dan buruknya suatu bangsa bergesip kepemimpinannya.⁷ Sekalipun pemimpin penting adanya, namun kita tidak diperkenankan meminta sebuah jabatan (amanah) menjadi pemimpin, sebagaimana hadis berikut :

عن عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم
يا عبد الرحمن لا تسئل الإمارة فإنك ان تعطيتها عن مسئلة و كئت إليها و
إن أعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها (رواه مسلم)

Dari ‘Abdurrahman bin Samrah r.a, katanya : “Rasulullah saw. Bersabda kepadku, Hai, ‘Abdurrahman! Janganlah engkau meminta-minta hendak menjadi pembesar negara. Karena jika engkau jadi pembesar karena permintaan, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat (jadi pembesar) tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu. (HR. Muslim).

⁴ Ibnu Taimyyah, *al-Siyāsah al-Shar’iyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, ttp, h. 157.

⁵ Edi Susanto, *Krisis Kepemimpinan Kiyai; Studi Atas Karisma Kiyai dalam Masyarakat, Surabaya, Jurnal Islamica*, Volume I, Nomor 2 Tahun 2007, h. 114.

⁶ Sartono Katodirjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 7-9.

⁷Lihat Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldn*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007, h. 85.

Hadits ini dengan tegas mengingatkan bahwa menjadi pemimpin tidak perlu berlomba-lomba mempopulerkan diri, apalagi sampai menyuap dan menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin.

Tindakan demikian bertolak belakang dengan prinsip amānah. Dalam riwayat lain ditegaskan perlunya tidak memilih pemimpin yang berebut kekuasaan (meminta jabatan).

عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم و أنا
رجلان من بني عمي فقال احد الرجلين يا رسول الله امرنا على بعد ما
ولّاك الله عز و جل و قال الآخر مثل ذلك فقال إنا و الله لا نؤلي على
هذا العمل احدا سأله و لا احدا حرص عليه (رواه مسلم)

Dari Abu Musa r.a., katanya: “Aku datang menemui Nabi bersama-sama dua orang lelaki anak pamanku. Yang seorang berkata, “Ya.. Rasulullah! Angkatlah aku jadi amir (pembesar) disuatu daerah yang telah dikuasakan Allah kepada Anda.” Dan seorang lagi berkata pula seperti itu. Jawab Rasul saw., “Demi Allah! Aku tidak akan mengangkat seseorang untuk memangku suatu jabatan, orang yang meminta-minta supaya dia diangkat, bahkan tidak pula yang mengharap-harap (berambisi) untuk itu.” (HR. Muslim).

Kita benar-benar diperingatkan bagaimana seharusnya mengangkat pemimpin, yaitu tidak memilih orang yang berambisi besar dengan suatu jabatan, karena jabatan merupakan jabatan (amanah) yang sangat besar yang tidak semua orang dapat melaksanakannya.

Dengan kata lain, walaupun hendak mengikuti pemilu, maka pilihlah mereka yang tidak berambisai besar, mereka yang bisa

mengembang amanah, memiliki kemampuan dan prasyarat lain yang diperlukan. Tentu saja konteks hadīth ini bukan dalam jabatan karir, dimana kenaikan jabatan karir bagian dari hak seseorang untuk mengembangkan diri berdasarkan evaluasi pengabdian, kinerja dan kualitas dan hasil yang diabdikan dalam suatu kelembagaan.

Memperhatikan siapa yang hendak dijadikan pemimpin dan standar persyaratan yang harus dipenuhi agar pemimpin yang dipilih benar-benar dapat membawa kebaikan bagian dari kehati-hatian untuk mencapai kemaslahatan yang hendak dicapai. Standar tersebut meliputi persyaratan: amanah, fatonah, tabligh dan shiddiq. Semangat hadīth ini bertalian dengan komitmen al-Qur'ān yang menghendaki menyerahkan amanah kepada ahlinya atau orang memiliki tanggung jawab dan terpercaya.

Amanah dalam hal memilih pemimpin harus pada orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya. Memilih pemimpin yang tidak amanah berarti menyalahi rumusan teks yang kekuatannya lebih otoritatif. Sebab itu, Islam tidak sekedar bertujuan menegakkan kekuasaan, namun juga memperhatikan aspek lain yang dapat mendorong tegaknya keadilan dan kemaslahatan. Aspek keadilan dan masalah harus dimulai dari proses memilih pemimpin yang amanah.

Memilih pemimpin yang amanah akan melahirkan kemaslahatan pula, sebaliknya memilih pemimpin yang tidak amanah akan melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Menyerahkan

amanah pada orang yang bukan ahlinya oleh sebagian riwayat dinilai mengkhianati Tuhan dan Nabi-Nya.

Menjaga kemaslahatan fisik lebih diutamakan dari pada mengerjakan hal lain yang dapat menggangukannya. Maka pemenuhan hak memilih pemimpin harus akhirkan (dinomor duakan), menjaga keselamatan jasmani dan rohani manusia bagian dari dharuriyah. Maka golput dapat berubah menjadi harus (wajib) karena dharuriyah.

Sikap malas menunjukkan keadaan traumatis terkait suatu obyek, mungkin tak menyenangkan, buruk dan mengakibatkan problem mental. Problem mental dan kejiwaan ini bagian rasa frustrasi yang harus dihindari. Islam menegaskan dirinya sebagai agama yang menjamin rahmat dan kedamaian, tidak imbang rasanya jika masyarakat selalu dituntut berbuat baik sementara sistem dan pola pemilu tak bisa menjamin terpenuhinya harapan masyarakat.

Persoalan golput salah satunya disebabkan perilaku, *Money politic* menciptakan persaingan dalam pemilu tidak fair, pemilih dikendalikan oleh materi bukan oleh hati. Kebenaran, pemimpin semacam ini jelas tidak bisa diberi amanah. Pemimpin yang menang dengan cara *money politic* akan membawa mala petaka besar bagi umat Islam, karena itu haram memilih pemimpin demikian, haram juga masyarakat golput karena tidak kecipratan *money politic*. Sebab ini merusak mental (aql) yang dalam agama harus ditegakkan.

Memilih pemimpin tidak dianjurkan dengan cara-cara kotor. Tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mekanisme yang buruk dan bathil seperti *money politic* kecuali sejumlah persoalan baru. Agama dengan tegas melarang tolong-monolong dalam hal dosa, sementara praktek ini bagian dari tindakan yang dilarang dalam agama.⁸

Selain pada pemimpin (kepala pemerintahan), rakyat juga, menitipkan aspirasinya pada lembaga perwakilan rakyat. Melalui lembaga terhormat ini, rakyat menaruh harapan besar, dengan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi kontrolnya diharapkan dapat mengimbangi kekuasaan eksekutif, turut serta menggariskan apa yang seharusnya rakyat peroleh.⁹

Lembaga legilastif dengan powernya yang begitu besar memainkan peranan penting dalam hal mengawasi kebijakan eksekutif, agar tak terlalu jauh dari apa yang telah digariskan.¹⁰ Legislatif dengan demikian, bagian dari orang-orang yang dipilih, dan menerima amanah rakyat.¹¹ Karenanya, harapan dan perhatian rakyat begitu besar, setidaknya melalui merekalah harapan keadilan masih dimungkinkan untuk dicapai.

Animasi politik ini pada akhirnya menciptakan apatisme rakyat terhadap politik itu sendiri. Politik dinilai sebagai sesuatu yang busuk, melahirkan ketegangan dan merajalelanya berbagai ketimpangan sosial.

⁸ Al-Qur'ān, 5 (al-Maidah): 3

⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 1996, h. 182.

¹⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 68.

¹¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 82.